



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## KOMITMEN MITIGASI KERAWANAN PILKADA SERENTAK 2024

**Aryo Wasisto**  
Analisis Legislatif Ahli Muda  
[aryo.wasisto@dpr.go.id](mailto:aryo.wasisto@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Rahmat Bagja, menyoroti tingkat kerawanan yang lebih tinggi pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 (Pilkada 2024) dibandingkan Pemilu 2024. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang intens antar calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Bawaslu mengharapkan sinergi dengan TNI, Polri, dan kejaksaan selama proses Pilkada 2024. Bawaslu telah mengidentifikasi 1.952 kerawanan, namun jumlah tersebut dianggap masih berupa perkiraan, yang dapat lebih tinggi lagi potensinya di lapangan. Menanggapi banyaknya kerawanan ini, Bawaslu menekankan tentang pentingnya sinergi kerja sama dengan pihak lain.

Bawaslu mencatat provinsi-provinsi seperti Sulawesi Tengah, Lampung, Bali, NTB, dan Jawa Timur menjadi lima provinsi yang paling aktif dalam melakukan pencegahan. Diperkirakan masa kampanye Pilkada serentak 2024 merupakan periode yang memiliki kerawanan tinggi berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), terutama dalam konteks sosial politik dan penyelenggaraannya di setiap tahapan.

Selain Bawaslu, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI juga melakukan pemetaan terhadap kerawanan Pilkada. Panglima TNI mengingatkan antisipasi dan penanganan terhadap potensi kerawanan Pilkada 2024 yang dapat terjadi dalam bentuk kerusuhan antar kelompok pendukung dan konflik berbasis suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Kerawanan tersebut diperkirakan akan meningkat di 15 daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, seperti Aceh dan Papua. Di beberapa daerah, konflik emosional berbasis SARA juga dapat terjadi jika politik identitas dimanfaatkan eskalasi faktor-faktor pemicunya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini, menurut Panglima TNI, jika tidak diantisipasi secara dini dan bijaksana, dapat berdampak negatif dalam bentuk perpecahan secara sosial kemasyarakatan, yang apalagi kalau sampai berbagai potensi kerawanan dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Papua memiliki tingkat kerawanan tinggi karena kelompok separatis bersenjata (KSB) terpantau mempunyai agenda untuk menggagalkan Pilkada guna mendelegitimasi NKRI, serta mencari perhatian dunia internasional. Aksi kelompok tersebut diidentifikasi terjadi di tujuh wilayah rawan sepanjang periode 2024, yaitu di Kabupaten Maybrat, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Selain kerawanan berupa benturan fisik, kerawanan dalam konteks politik uang juga diperkirakan akan meningkat. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, memberi saran agar penyaluran bantuan sosial diberhentikan saat Pilkada serentak nasional 2024. Alasannya, menghindari politisasi dari petahana atau kerabat dan menciptakan pilkada yang adil. Saran ini merupakan hasil analisis survei KPK yang menyatakan 90 persen masyarakat Indonesia memilih pemimpin berdasarkan faktor uang.

Bawaslu, TNI, dan Polri merupakan elemen penting bagi komitmennya terhadap mitigasi potensi kerawanan Pilkada 2024. Selain itu, penting juga untuk mengikutsertakan partisipasi masyarakat khususnya dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada atau mencegah terjadinya kemungkinan dugaan kecurangan. Dari sisi masyarakat sipil, peran pemantau Pilkada dianggap krusial

## Atensi DPR

Menghadapi dua bentuk kerawanan Pilkada serentak 2024, kemungkinan terjadinya konflik fisik dan dugaan politik uang, Komisi II DPR RI perlu menekankan pentingnya komitmen KPU dan Bawaslu dalam mengantisipasi segala bentuk kecurangan Pilkada di setiap tahapan. Selain itu, agar Komisi II DPR RI mendorong Bawaslu untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Adapun khusus pada konteks keamanan wilayah, penting agar KPU dan Bawaslu beserta jajarannya di setiap daerah untuk meningkatkan komunikasi intensif dengan TNI dan Polri dalam upaya melakukan koordinasi mitigasi guna mencegah konflik fisik. Berkaca dari pemetaan yang sudah dilakukan oleh masing-masing instansi ditambah dengan pengalaman Pemilu 2024, penting dipastikan bahwa penanganan konflik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi pihak penyelenggara dituntut komitmennya untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai regulasi, termasuk memastikan bahwa semua partai dan peserta pasangan calon yang ada mematuhi peraturan.

## Sumber

*Kompas*, 21 Maret 2024;  
kompas.com, 15 Maret 2024;  
republika.co.id, 15 Maret 2024;  
sindonews.com, 24 Maret 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

## EDITOR

**Polhukam**  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

**Ekkuinbang**  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.